

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 disusun sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” yang lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No : 100.2.2.7/8697/OTDA tanggal 11 Desember 2023 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023, yang mencakup 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib non pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan serta 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan serta capaian kinerja standar pelayanan minimal selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan-perbaikan pada kurun waktu kedepan sehingga pelaksanaan beberapa tugas Urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dapat lebih terarah dan maksimal sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan capaian kinerja program / serta permasalahan dan alternatif solusi.

Permasalahan yang dihadapi dan tidak tercapai dalam pelaksanaan program / kegiatan Tahun Anggaran 2023 selanjutnya dapat menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya. Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini, juga diharapkan sebagai masukan dari *stakeholder* dalam memberikan pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, serta dapat menjadi bahan pertimbangan selanjutnya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini bukan hanya sekedar formalitas belaka.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah sebagai laporan secara tertulis sesuai format baku yang telah ditetapkan sebagai sebuah harapan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan secara sinergitas, keterpaduan dan kesepahaman serta kerjasama dari seluruh unsur Perangkat Daerah dan didukung masyarakat selama kurun tahun 2023 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan

kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang harus segera di atasi dan dibenahi secara bersama dan terpadu.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah berusaha memenuhi komitmen sebagai upaya moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi potensi pada setiap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat dimasa mendatang. Adapun hasil Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, meskipun masih terdapat berbagai permasalahan di beberapa urusan, tetapi secara keseluruhan menunjukkan telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hasil tersebut dicapai berkat kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan didukung dengan berbagai pihak antara lain, Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat dan partisipasi serta kerjasama dari seluruh komponen masyarakat.

Dengan terselesaikannya laporan ini, kami menghaturkan terima kasih kepada semua pihak pada setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat yang telah terlaksana secara harmonis dan ideal dengan mengedepankan slogan “**SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI**” dapat menjadi spirit dalam membangun Provinsi Sulawesi Barat kedepan dan harapan kami semoga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi semua.

**Tim Penyusun LPPD  
Prov.Sulbar 2023**